

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Binjai sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai sudah memperlihatkan kinerja yang baik dalam hal kebijakan walaupun masih belum dapat dikatakan secara maksimal. Dikarenakan belum adanya pencatatan khusus organisasi atau struktur khusus K3 di BPBD Kota Binjai, tidak adanya anggaran khusus terkait program P2K3, belum ditetapkannya SK khusus K3 kepada pegawai dan tidak melakukan penilaian kerja dan tindak lanjut K3 di BPBD Kota Binjai. Namun diketahui juga bahwa secara tersirat pelaksanaan K3 tetap diterapkan oleh pegawai yang bertugas di BPBD Kota Binjai dan tentunya mereka juga sudah terlatih dan berpengalaman dalam menangani bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai belum membuat program apapun terkait Sistem Manajemen K3 di BPBD Kota Binjai seperti Pengenalan Ancaman, Evaluasi dan Manajemen Risiko serta Early Programming and Programming Activity yang sedang berjalan belum sudah terlaksana dengan baik karena BPBD sedang menjajaki ketentuan dari Basarnas dan BNPB Pusat.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai sudah melakukan kinerja yang baik dalam hal Penerapan, namun ada beberapa yang belum maksimal dalam hal mengkomunikasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja hanya sebatas lisan sebelum melakukan pekerjaan dan pegawai tidak diberi prosedur tertulis dalam menanggapi keadaan darurat, namun di BPBD telah tersedia bidang khusus yang menangani tentang keadaan kesiapsiagaan, telah tersedia pembagian personel di bidang komunikasi, pelaporan, dan pendokumentasian, dan tersedia juga fasilitas APD, P3K dalam menghadapi insiden dalam bekerja.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam hal melakukan pengukuran dan evaluasi Sistem Manajemen K3 belum dikatakan baik, dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti telah dilakukan inspeksi atau Audit mengenai Sistem Manajemen K3 serta penjelasan bahwa tidak ada Audit khusus K3 melainkan Audit dalam hal anggaran oleh Inspektorat, BPK, dan itu lebih kearah kelayakan administrasi dan kebijakan lain di luar K3.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan untuk membuat pencatatan khusus struktur organisasi dan menetapkan SK Khusus untuk pegawai BPBD Kota Binjai dan membuat perencanaan Identifikasi Bahaya serta membuat catatan inspeksi agar nantinya mudah untuk dilakukan evaluasi dan audit SMK3.
2. Kepada pemerintah Kota Binjai Diharapkan dapat berbagi perhitungan khusus untuk melaksanakan program perlindungan K3 di Kantor BPBD Kota Binjai.